



Korupsi Pengadaan Kapal Nelayan di Buleleng ✓ **Syahbandar dan Ahli Marine Nyatakan Kapal Tidak Layak**

DENPASAR, NusaBali

Hasil pemeriksaan syahbandar dan ahli dari Marine KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) kembali menyatakan kegagalan dalam pengadaan kapal untuk nelayan di Buleleng. Penyidik kini tinggal menunggu hasil gelar dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) Wilayah Bali untuk menentukan kerugian negara.

"Hasil ahli dari kesyahbandaran menyatakan, untuk syarat kelautannya tidak layak. Ahli dari marine KKP juga menyatakan kapal tidak layak," jelas Kasi Penuntutan Kejati Bali, I Wayan Suardi saat dikonfirmasi,

Jumat (10/3).

Ia mengatakan untuk kasus ini berarti tinggal menunggu hasil ekspose BPKP untuk menentukan kerugian negara. Selanjutnya pihaknya akan melakukan gelar untuk menentukan tersangka. Saat ditanya calon tersangka, jaksa berbadan tambun ini mengatakan lebih dari satu. "Yang pasti calon tersangkanya banyak," tegasnya.

Seperti diketahui, penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal ikan untuk nelayan di Buleleng ini sendiri sudah berjalan sekitar satu tahun. Dalam kasus ini, penyidik Pidsus Kejati Bali mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan kapal untuk nelayan

dari Kementerian Perikanan dan Kelautan senilai Rp 10 miliar. Dugaan awal, tujuh kapal yang dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan nelayan. Bahkan disebut ada kegagalan dalam komponen dan piranti kapal yang jauh dari kata layak.

Informasi yang dihimpun, dalam kasus ini penyidik sudah menyiapkan dua calon tersangka. Namun belum diungkap siapa saja dua calon tersangka yang kabarnya sudah beberapa kali diperiksa penyidik. Dalam kasus ini, penyidik sudah memeriksa beberapa pejabat di Disnakanlut Bali, Disnakanlut Buleleng serta rekanan dari PT F1. **rez**

Edisi : Sabtu, 11 Maret 2017

Hal : 11